

Warga DKI Tolak Motor Kena ERP

JAKARTA (IM) - Pemprov DKI Jakarta berwacana menerapkan jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP) kepada pengguna sepeda motor. Wacana tersebut ditolak sejumlah pengendara motor.

Seorang pengemudi ojek online Bambang (34) mengatakan telah lama mengetahui wacana sejak Anis Baswedan masih menjadi Gubernur DKI. Dia tak setuju dengan wacana tersebut.

"Udah dari lama itu, sebelum ganti Gubernur juga sudah ada," kata Bambang saat ditemui di kawasan Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (26/1).

Bambang menyatakan tak setuju dengan rencana tersebut. Menurutnya, yang kerap menimbulkan macet di jalanan karena banyaknya mobil.

"Kalau buat motor kayaknya nggak setuju sih, soalnya kayaknya berat. Di jalan kan mobil yang bikin macet bukan motor, kebanyakan jalur motor dimasuki mobil, jadi motor nggak ada jalan," kata Bambang.

Selain itu, lanjutnya, wacana tersebut juga akan sangat berdampak bagi para pengemudi dan pengguna ojek online. Sebab, mobilitas ojek online di jalan sangat tinggi.

"Misalkan lewat jalan yang kena ERP pasti rugi, dalam artian rugi misalkan orderan aja sepi, dapet gitu, potongan udah banyak, terimbas banget," ungkapnya.

Sementara itu, pengguna jalan lainnya, Teddy (41), juga tak setuju dengan rencana sepeda motor jadi sasaran ERP.

Sebab, lanjutnya, mobilitasnya sehari-hari melalui jalan yang akan diterapkan ERP.

"Anak mau sekolah di daerah Gajah Mada, gimana kita? Anak mau sekolah, masa tiap hari mau nganter mesti bayar. Mesti lewat jalur itu mau nggak mau, soalnya mau lewat mana lagi," tutur Teddy saat ditemui di kawasan Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat.

Teddy juga mengatakan telah mengetahui wacana pemerintah itu. Menurutnya, wacana itu akan memberatkan pengguna motor.

"Keberatan sih sebenarnya. Sebagai rakyat yang belakangan yang susah sudah berat masa disuruh berbayar. Keberatan lah intinya," ungkapnya.

Pengemudi motor lainnya, Juanda (70), mengaku baru mendengar terkait wacana tersebut. Kendati begitu, Juanda juga tidak setuju dengan rencana itu.

"Itu sih nggak setuju, soalnya kita rakyat kecil. Kalau katanya bayar, buat apa kita bayar pajak. Motor kan bayar pajak, kalau kita di sini bayar, ya kita nggak usah bayar pajak," ujar Juanda saat ditemui di kawasan Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Menurutnya, jika pemerintah memang memikirkan rakyat, rencana tersebut semestinya tidak akan diterapkan.

"Kalau pemerintah mikirin rakyat, Jalan Merdeka Barat atau jalan protokol ini nggak usah bayar lah, kita bukan jalan tol kan," kata Juanda. ● yan

4 | Metropolis

FOTO: ANT



PERS DAN PEMILU SERENTAK 2024

Deputi Bidang Kesatuan Bangsa Kementerian Dalam Negeri M. Gaffar dalam seminar "Pers dan Pemilu Serentak 2024" di Jakarta, Kamis (26/1). Dalam seminar tersebut Gaffar berharap Pers harus jadi referensi utama pemilih dalam pemilu.

Heru Budi Revisi Pernyataan Proyek Sodetan Ciliwung Mangkrak 6 Tahun

Heru mengatakan secara fisik proyek inlet tetap berjalan selama 6 tahun. Namun, jika secara keseluruhan, beberapa kendala membuat proyek sodetan ini tidak optimal dan terhenti. "Secara fisik yang di inlet iya, tapi kan secara keseluruhan kan ada beberapa kendala, sehingga nggak optimal juga," katanya.

JAKARTA (IM) - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono buka-bukaan soal penyebab sodetan Ciliwung mangkrak selama 6 tahun. Dia memaparkan kendala yang terjadi dalam pembebasan lahan.

"Ya kan itu tahap-tahapnya itu ada sodetan di Kebon Nanas, istilahnya inlet dan outlet. Yang inlet sudah proses dari 2013 sampai 2016. Terus kata Pak Menteri (PUPR) ada beberapa hal kendala. Terus yang di-outletnya sejak berapa kurun waktu itu memang berhenti karena

salurannya harus dibebaskan. Beberapa kendala, (seperti) ada rumah warga, terus harus didetailkan datanya oleh BPN, dengan Trisakti, dan sekarang sudah selesai," kata Heru kepada wartawan, Kamis (26/1).

Heru mengatakan secara fisik proyek inlet tetap berjalan selama 6 tahun. Namun, jika secara keseluruhan, beberapa kendala membuat proyek sodetan ini tidak optimal dan terhenti.

"Secara fisik yang di inlet iya, tapi kan secara keseluruhan kan ada beberapa kendala, sehingga nggak optimal

juga, nggak bisa juga kan begitu," ungkapnya.

Lebih lanjut Heru menyebutkan proses pembebasan lahan kini seluruhnya selesai. Pembangunan fisik sodetan Kali Ciliwung juga sedang diselesaikan penyambungannya.

"Sudah selesai semua, nggak ada lagi. Untuk lahan semuanya sudah selesai. Secara teknis dan lain-lain itu sudah selesai, tinggal yang tadi saya sampaikan, harus ngetes, kemarin yang sudah dibebaskan tapi belum diturap, sekarang diturap. Ya, April selesai. Sudah tidak ada masalah," ujarnya.

Heru juga menyampaikan warga yang terdampak dari proyek pembangunan sodetan sudah dipindahkan seluruhnya ke rumah susun yang sudah ada. Adapun rumah susun tersebut nantinya akan dikenakan tarif sewa sebagaimana yang biasa ditetapkan dalam peraturan rumah susun.

"Iya, iya itu sudah selesai

semua (dipindahkan ke rumah susun). Dikasih rumah susun. Tentunya rumah susun kan ada aturanlah. Nanti kan mereka bisa sewa, kan kira-kira begitu," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, mengapresiasi upaya Pj Gubernur Heru dalam melanjutkan upaya pengentasan banjir. Keduanya menjelaskan, langkah yang dilakukan dengan normalisasi kali, pembangunan sodetan hingga pembangunan waduk berperan penting mengurangi banjir Jakarta.

Namun, Jokowi dan Basuki kompak menyatakan kekecewaan tatkala pengentasan penangan banjir terhenti selama enam tahun. Meski tidak menyebut nama, namun tersirat jika ia seolah menyindir Gubernur DKI periode 2017-2022, Anies Rasyid Baswedan.

"Kalau itu konsisten dilakukan dari dulu, pasti sudah berkurang; masalahnya tadi kan enam tahun *ngga diapa-apain*, normalisasi *ga diapa-apain*, sodetan *ga diapa-apain*," kata Basuki usai mendampingi Jokowi. ● yan

Enam Calon Sekda DKI yang Lolos Tes Manajerial dan Sosiokultural

JAKARTA (IM) - Enam orang dinyatakan lolos tes manajerial dan sosiokultural berupa asesmen dalam proses lelang jabatan sekretaris daerah (Sekda) DKI Jakarta definitif. Tes ini diselenggarakan Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Kepegawaian Negara.

Pengumuman enam nama itu tercantum dalam Pengumuman Nomor 3 Tahun 2023 tentang Hasil Tes Manajerial dan Sosio Kultural (Assesment) dan Jadwal Wawancara Panitia Seleksi Dalam Rangka Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekda Provinsi DKI Jakarta.

Adapun Pengumuman Nomor 3 Tahun 2023 itu ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Suhajar Diantoro pada 25 Januari 2023. Berikut nama keenam orang yang lolos tes manajerial dan sosiokultural itu: 1. Benni Agusandra (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu DKI Jakarta). 2. Dhany Sukma (Wali Kota Jakarta Pusat). 3. Isnawa Adji (Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta). 4. Joko Agus Setyono (Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Bali). 5. Michael Rolandi Cesnanta Brata (Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta). 6. Syaefuloh Hidayat (Inspektur DKI Jakarta).

Keenam orang yang lolos tes ini berhak mengikuti proses lelang jabatan sekda DKI definitif selanjutnya, yakni wawancara panitia pelaksanaan (pansel) yang akan digelar pada Kamis (26/1). Wawancara pansel digelar di Ruang Sidang Utama Gedung A Lantai 3 Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Pengumuman Nomor 3 Tahun 2023, orang yang tidak lolos tes manajerial dan sosiokultural itu adalah Bayu Meghantara, Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda DKI Jakarta. ● yan

Jelang KTT ASEAN, DKI Hentikan Sementara Proyek Galian

JAKARTA (IM) - Pemprov DKI Jakarta menghentikan sementara pengerjaan sejumlah proyek galian di sepanjang jalan protokol wilayah Ibu Kota. Adapun hal ini dikarenakan dalam rangka menyambut Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2023.

Diketahui, Jakarta akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN 2023. Acara berskala internasional itu akan dihelat di Jakarta Convention Center (JCC) pada September mendatang. Penghentian sementara proyek galian juga mandat dari Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono kepada Dinas Bina Marga DKI.

"Pak Pj Gubernur kemarin menyampaikan, untuk menyongsong KTT ASEAN pada September, kalau mau gali-menggali, itu mungkin bisa bulan ini sampai bulan depan lah," jelas Kepala Dinas Bina Marga, Hari Nugroho ke-

pada wartawan, Kamis (26/1). Hingga September 2023, para kontraktor hanya boleh melakukan galian, misalnya untuk proyek Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) di kawasan Jakarta, selain jalan protokol.

"Nanti menuju September, tidak ada lagi yang namanya galian di sepanjang jalan protokol. Kalau di wilayah pinggiran, silakan saja. Tapi kalau jalan protokol, itu sudah kita larang," imbuh Hari.

Lebih lanjut, dia mencontohkan pengerjaan proyek galian di Jalan Malahayati, Jakarta Timur, yang sengaja di-dahulukan. Sehingga, proyek galian bisa tetap berjalan sesuai target, meskipun ada perhalatan KTT ASEAN.

Sebelumnya, Pj Gubernur DKI juga telah menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov DKI, untuk mendukung penuh Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023, serta peran Jakarta sebagai tuan rumah MGCAM 2023. ● yan



FOTO: ANT

HARI BAKTI KE-73 IMIGRASI

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan melaksanakan Hari Bakti Ke-73 Imigrasi Tahun 2023 di Jakarta, Kamis (26/1).

Ada 44 Warga Mengadu Data Pribadinya Dicatut sebagai Pendukung Balon DPD RI

JAKARTA (IM) - Koordinator Divisi Humas dan Data Informatika Bawaslu DKI Jakarta, Sitti Rakhman mengatakan, ada 44 warga Jakarta mengadu data pribadinya dicatut sebagai pendukung bakal calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. "Hingga 25 Januari 2023 terdapat 44 aduan masyarakat yang nama dan NIK-nya (nomor induk kependudukan) dicatut oleh bakal calon anggota DPD yang dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pencalonan (Silon)," ujar Sitti, Kamis (26/1).

Menurut Sitti, data tersebut didapat dari laporan yang masuk melalui posko pengaduan masyarakat, salah satunya dari mereka yang datang langsung ke kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi ataupun Bawaslu Kota.

Selain itu, kata Sitti, warga yang merasa namanya dicatut juga melapor melalui link aduan masyarakat yang dipublikasikan di masing-masing website dan media sosial. Sitti menyebutkan 44 warga Jakarta itu merasa datanya dicatut

untuk mendukung bacaleg DPD RI yang tersebar di sejumlah wilayah Jakarta.

Adapun rinciannya, terdiri 17 aduan di Jakarta Pusat, 7 aduan di Jakarta Utara, 8 aduan di Jakarta Selatan dan 12 aduan di Jakarta Timur. "Rinciannya 24 laki-laki dan 20 perempuan," kata Sitti.

Untuk memastikan tak ada kecurangan yang dilakukan dalam proses tahapan pendaftaran bacaleg, Sitti mengajak masyarakat untuk secara aktif melakukan pengecekan terhadap data diri melalui laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik_pendukung.

"Jika bukan pendukung calon anggota DPD tetapi tercantum sebagai pendukung calon anggota DPD maka dapat segera melaporkan ke Bawaslu," kata Sitti.

Saat ini, lanjut Sitti, Bawaslu DKI Jakarta dan tingkat kota juga telah mendirikan posko pengaduan masyarakat guna menerima adanya aduan dan keberatan masyarakat terhadap penggunaan data diri sebagai pendukung bacaleg DPD RI.

Diketahui, para bacaleg DPD RI diharuskan mengumpulkan minimal 3.000 dukungan KTP warga Jakarta sebagai persyaratan mendaftar di KPU DKI Jakarta. Adapun saat ini proses pendaftaran bacaleg DPD masih tahap verifikasi administrasi. ● yan

Tinggi, Angka Perceraian di Kota Depok pada 2022

DEPOK (IM) - Kasus perceraian di Kota Depok, Jawa Barat, tinggi mencapai ribuan perkara. Dari Januari hingga Desember 2022 tercatat 3.345 perkara cerai. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Kadis PPPAPKB) Kota Depok, Nessi Annisa Handari mengatakan, angka perceraian di Kota Depok yang ditangani Pengadilan Agama masih tinggi, baik kasus talak maupun gugat.

Total perempuan yang cerai di Kota Depok tahun 2022 mencapai 3.345 orang yang terdiri dari 1.452 per-Kartu Keluarga (KK) Kota Depok dan ber-Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Depok, dan sebanyak 1.893 jiwa tak

ber-KTP ber-KK Kota Depok. Mereka tinggal di Kota Depok dengan surat domisili. "Dari kasus putusan cerai sebanyak 3.345 orang, yang ber-KTP Kota Depok sebanyak 1.452, yang lainnya atau surat domisili sebanyak (1.893 orang)," kata Nessi Annisa (26/1).

Tiga hal yang memicu terjadinya kasus perceraian di Kota Depok. Yakni akibat perselisihan dan pertengkarangan pasangan. Soal ekonomi, dan pasangan meninggalkan pasangannya.

"Pertengkarangan, ekonomi, dan pasangan meninggalkan pasangan adalah pemicu perceraian di Kota Depok," ungkap Nessi.

Menurut Nessi memang ada hal lain yang memicu pasangan bercerai. Yakni

masalah hubungan yang tak lagi harmonis dan hadirnya orang ketiga.

Dikatakan, di tahun 2022 Pengadilan Agama Kota Depok mendaftarkan 3.887 pemohon cerai. 542 di antaranya kembali rujuk. "542 pemohon cerai bisa bersatu kembali, dan 3.345 lainnya bersikukuh cerai," ucap Nessi.

Ia pun mengimbau setiap pasangan agar meningkatkan ikatan pernikahan supaya menjadi kokoh, kuat, dan langgeng sehingga pernikahan tersebut menjadi pernikahan yang kekal, abadi hingga akhir hayat.

"Agar tali-tali itu menjadi kuat, kokoh dan utuh selamanya maka harus ada usaha yang harus dilakukan oleh setiap pasangan," pungkasnya. ● yan



FOTO: ANT

JELANG KONSER TUNGGAL RAISA

Penyanyi Raisa berpose usai menyampaikan keterangan pers menjelang konsernya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis (26/1). Raisa Andriana akan menggelar konser tunggal yang bertajuk Raisa Live in Concert pada 25 Februari 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan membawakan 26 lagu.

PENGUMUMAN
Kami Direksi PT. MANGGALA CIPTA KENCANA, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) memberitahukan bahwa Perseroan akan menurunkan Modal Perseroan.
Pengumuman dimaksudkan agar pihak-pihak yang berkepentingan mengetahui bahwa akan dilakukan Penurunan Modal Perseroan dan dapat mengajukan keberatan ke kantor Perseroan, Aldeor Building Lt.6, Jalan Warung Jati Barat No.39, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12740.
Demikian pengumuman ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) UU nomor 40 Tahun 2007.
Hormat Kami,
Direksi PT. MANGGALA CIPTA KENCANA